

Tabel 3. 3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Singkawang

NSPK DAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-						TARGET KONDISI
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	AKHIR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya Konektivitas Wilayah	Meningkatnya Konektivitas Wilayah	Indeks Konektivitas Wilayah			1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2
			Meningkatnya Kinerja Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	V/C Rasio di Jalan Kabupaten/Kota	0,31	0,33	0,33	0,35	0,35	0,37	0,37
			Meningkatnya Konektivitas Perkotaan	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	50	52	54	55	57	59	59

3.3 Strategi

Strategi Menurut Permendagri No. 86 Tahun 2017 yaitu rumusan langkah-langkah atau pendekatan kebijakan yang bersifat umum dan menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran maka harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan yang mencakup penentuan kebijakan dan program yang menunjukkan konsekuensi yang jelas sebagai suatu sistem operasional dari aktivitas organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan Target dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Singkawang.

Adapun strategi yang tepat guna mendukung terwujudnya tujuan yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Singkawang di tunjukan pada tabel 3.4:

Tabel 3. 4 Penjabaran Strategi Dinas Perhubungan Kota Singkawang Tahun 2025-2029

Visi	Visi: Maju, Atraktif, Berkelanjutan						
Misi 4	Misi 4 : Meningkatkan infrastruktur dan penataan kota yang berkualitas, modern, dan berkelanjutan						
Tujuan	Sasaran	Strategi	Rencana Pelaksanaan				
			2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya Konektivitas Wilayah	Sasaran 1: Meningkatnya Kinerja Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Peningkatan pemenuhan infrastruktur jalan perkotaan	✓	✓	✓	✓	✓
		Optimalisasi kinerja ruas dan persimpangan jalan	✓	✓	✓	✓	✓
		Peningkatan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas	✓	✓	✓	✓	✓

Visi	Visi: Maju, Atraktif, Berkelanjutan						
Misi 4	Misi 4 : Meningkatkan infrastruktur dan penataan kota yang berkualitas, modern, dan berkelanjutan						
Tujuan	Sasaran	Strategi	Rencana Pelaksanaan				
			2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya Konektivitas Wilayah	Sasaran 2: Meningkatnya Konektivitas Perkotaan	Peningkatan pelayanan penyelenggaraan angkutan jalan	✓	✓	✓	✓	✓
		Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pelayaran	✓	✓	✓	✓	✓
		Peningkatan pelayanan pengelolaan penerbangan	✓	✓	✓	✓	✓

3.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan RPJMD Kota Singkawang Tahun 2025-2029 dalam perencanaan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, maka Dinas Perhubungan perlu menyusun strategi perencanaan jangka menengah dengan menggunakan SWOT/Metode Perencanaan Strategis yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pelaksanaan perencanaan pembangunan. Penahapan Pembangunan Dinas Perhubungan Kota Singkawang tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. 5 Penahapan Pembangunan Dinas Perhubungan Kota Singkawang Tahun 2025-2029

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Percepatan penyediaan infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar wilayah dan keselamatan	Peningkatan kualitas jalan penghubung dan transportasi antar wilayah serta edukasi keselamatan	Integrasi Moda dan Standarisasi	Digitalisasi dan Inovasi	Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan

Penahapan pembangunan pada Dinas Perhubungan Kota Singkawang tahun 2026 – 2030 dirancang secara bertahap dan strategis sesuai dengan tahapan pada RPJMD pembangunan Kota Singkawang tahun 2025 – 2029. Pada tahun 2026 fokus pembangunan Dinas Perhubungan Kota Singkawang yaitu percepatan penyediaan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah dan keselamatan, meliputi :

1. Pemetaan wilayah minim akses
2. Audit keselamatan jalan
3. Revitalisasi rambu dan marka

Pada Tahun 2027 pembangunan dapat diarahkan kepada peningkatan kualitas jalan penghubung dan transportasi antar wilayah serta edukasi keselamatan , antara lain:

1. Peningkatan jalan penghubung antar perkotaan
2. Sosialisasi keselamatan transportasi
3. Penataan trotoar dan halte

Selanjutnya untuk tahap ketiga pada tahun 2028 pembangunan Dinas Perhubungan Kota Singkawang mengarah kepada integrasi moda dan standarisasi, seperti:

1. Penyusunan trayek berbasis kebutuhan
2. Pembangunan simpul transportasi
3. Manajemen rekayasa lalu lintas

Pada tahun 2029 yang menjadi tahap ke 4 yaitu digitalisasi dan inovasi menjadi penguatan sistem informasi transportasi dengan berbasis teknologi serta analisis data keselamatan lalu lintas. Sedangkan pada tahun 2030 menjadi tahun pencapaian visi dan misi Kota Singkawang dengan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan evaluasi sistem konektivitas serta penguatan kemitraan publik – swasta.

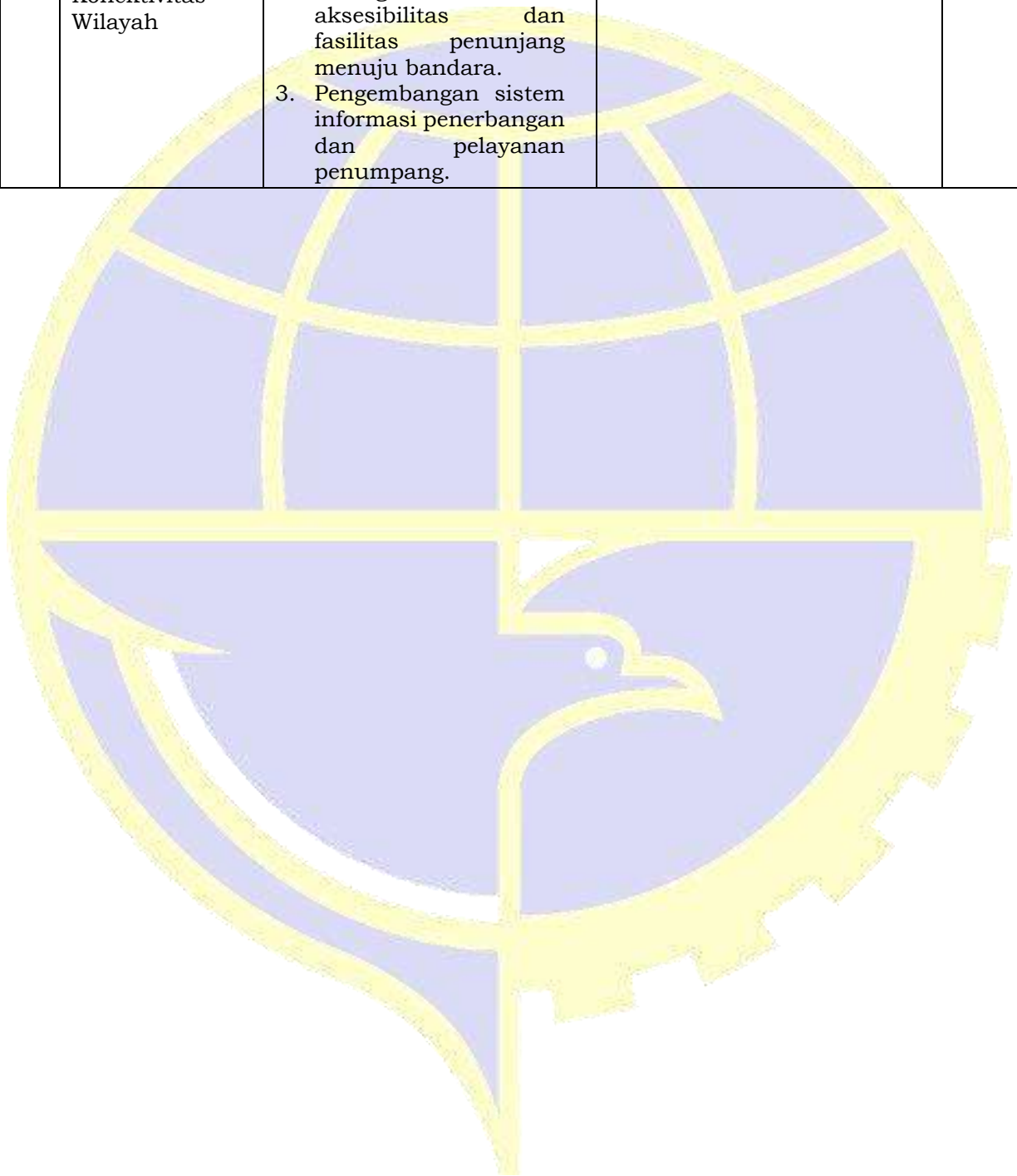
Selanjutnya keterkaitan penahapan pembangunan dengan arah kebijakan pada Dinas Perhubungan Kota Singkawang Tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 6 Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Singkawang Tahun 2025-2029

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan Dinas Perhubungan	Arah Kebijakan RPJMD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Konektivitas Wilayah	<p>Arah Kebijakan 1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan infrastruktur jalan dengan memperhatikan aspek keselamatan pengguna jalan. 2. Pemeliharaan berkala jalan-jalan strategis dalam kawasan perkotaan. 3. Penambahan fasilitas keselamatan seperti trotoar, lampu PJU, dan rambu lalu lintas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memprioritaskan pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas publik yang mendukung mobilitas serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kota Singkawang. 2. Memprioritaskan air bersih, sanitasi, drainase/pengendalian banjir. 3. Mempercepat pembangunan infrastruktur berbasis teknologi, termasuk konektivitas internet yang lebih baik dan sistem transportasi yang efisien, guna mendukung perekonomian digital dan konektivitas antarwilayah 	

2		<p>Arah Kebijakan 2:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan ulang persimpangan rawan kemacetan dan kecelakaan. 2. Penggunaan teknologi manajemen lalu lintas (ATCS, sensor, CCTV). 3. Penyesuaian desain geometri jalan untuk meningkatkan kelancaran dan keselamatan. 		
3	Meningkatnya Konektivitas Wilayah	<p>Arah Kebijakan 3:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kampanye keselamatan lalu lintas di sekolah, komunitas, dan media sosial. 2. Penguatan edukasi dan pelatihan berkendara aman kepada pengemudi angkutan umum. 3. Kemitraan dengan aparat dan komunitas dalam kegiatan tertib lalu lintas. 		
4		<p>Arah Kebijakan 4:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan rute dan trayek angkutan umum sesuai kebutuhan mobilitas masyarakat. 2. Peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum (waktu, kenyamanan, tarif). 3. Pengembangan sistem informasi layanan transportasi berbasis digital. 		
5		<p>Arah Kebijakan 5:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi operasional pelabuhan lokal dan dermaga penumpang. 2. Penyediaan sarana transportasi air yang aman dan layak. 3. Koordinasi antarwilayah dalam pelayanan pelayaran antar-kawasan. 		

6	Meningkatnya Konektivitas Wilayah	<p>Arah Kebijakan 6:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi peningkatan jadwal dan frekuensi penerbangan ke/dari Singkawang. 2. Peningkatan aksesibilitas dan fasilitas penunjang menuju bandara. 3. Pengembangan sistem informasi penerbangan dan pelayanan penumpang. 		
---	-----------------------------------	--	--	--



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Singkawang sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Penyusunan program, kegiatan dan sub Kegiatan Dinas Perhubungan Kota Singkawang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021.

Program, kegiatan dan sub Kegiatan yang dilaksanakan merupakan penjabaran dari strategi dan kebijakan yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya, adapun program, kegiatan dan sub Kegiatan tersebut tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

- 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Sub Kegiatan:
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD;
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD;
 - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan:
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;

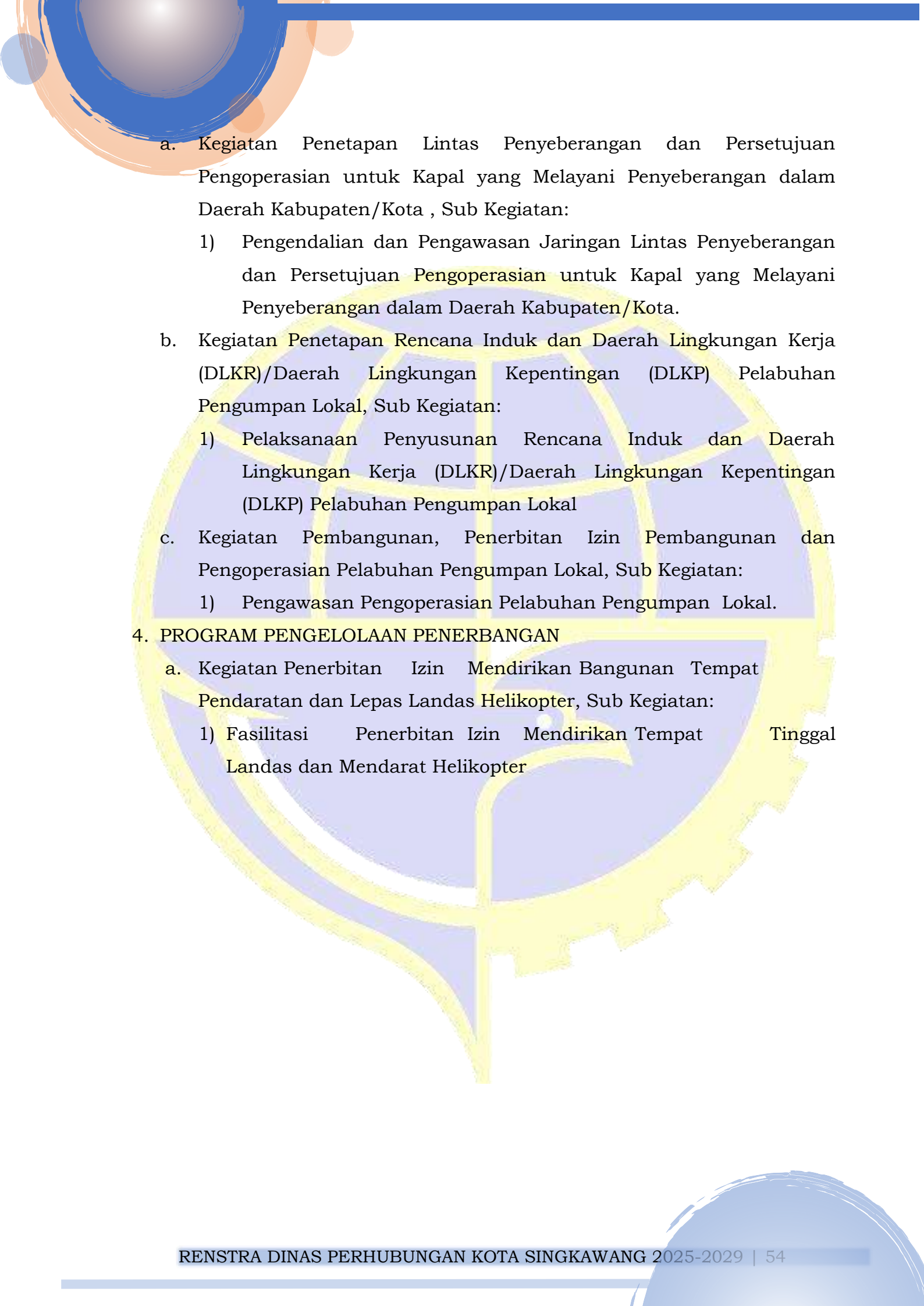
- 4) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan.
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Sub Kegiatan:
 - 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
 - 2) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;
 - 3) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- d. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan:
 - 1) Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah;
 - 2) Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah.
- e. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Sub Kegiatan:
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- f. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan:
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor;
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - 6) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 7) Pengadaan Mebel;
 - 8) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan:
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan:

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
- a. Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten / Kota, Sub Kegiatan:
 - 1) Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota;
 - 2) Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota;
 - 3) Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota.
 - b. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota, Sub Kegiatan:
 - 1) Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten / Kota;
 - 2) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota;
 - 3) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan;
 - 4) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan.
 - c. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C, Sub Kegiatan:
 - 1) Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang);
 - 2) Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C;
 - 3) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung);
 - d. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, Sub Kegiatan:
 - 1) Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan

- Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota.
- e. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Sub Kegiatan:
- 1) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
 - 2) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
 - 3) Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
 - 4) Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
 - 5) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
 - 6) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
- f. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan:
- 1) Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota;
 - 2) Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - 3) Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota;
 - 4) Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota;
 - 5) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota.
- g. Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan:

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin;
 - 2) Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin.
- h. Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan, Sub Kegiatan:
- 1) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
 - 2) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota;
 - 3) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.
- i. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan:
- 1) Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.
- j. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan:
- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota.
- k. Kegiatan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota , Sub Kegiatan:
- 1) Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - 2) Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

3. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

- 
- a. Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota , Sub Kegiatan:
 - 1) Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Kegiatan Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal, Sub Kegiatan:
 - 1) Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal
 - c. Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal, Sub Kegiatan:
 - 1) Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal.
4. PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN
- a. Kegiatan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter, Sub Kegiatan:
 - 1) Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter

Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Perhubungan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SEBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
DINAS PERHUBUNGAN KOTA SINGKAWANG							
Meningkatnya Konektivitas Wilayah	Meningkatnya Konektivitas Wilayah				Indeks Konektivitas Wilayah		
		Meningkatnya Kinerja Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota		
			Meningkatnya jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas		Persentase Jalan yang Memenuhi Standar Keselamatan Lalu Lintas	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
				Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ	Jumlah Ketersediaan Dokumen Perencanaan (rencana induk/ masterplan/ kajian)	2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2.15.02.2.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas	Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2.15.02.2.01.0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SEBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2.15.02.2.01.0007 Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
					Persentase Ruas Jalan yang Bermasalah	2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.06.0014 Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya jalan yang memenuhi standar	Jumlah Dokumen Rencana Induk	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	